



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pemalang, 27 Maret 2023

Kepada :

Yth. Inspektur Kab. Pemalang

di -

PEMALANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 537 / PU TR

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman Data Rekomendasi Atas LKjIP tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang	1 (satu) bendel lampiran	Dikirim dengan hormat dan untuk menjadikan periksa.

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG
Sekretaris,



Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19651224 199403 1 009

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pemalang
2. Arsip

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 34 Kab. Pemalang
Telp. (0284) 321042

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia - Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022. LKjIP DPU TR Kabupaten Pemalang merupakan bentuk komitmen nyata Dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja DPU TR Kabupaten Pemalang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja DPU TR Kabupaten Pemalang. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pemalang, Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris,



HERY FIRMANTIO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19651224 199403 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang dicapai di tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	2,56	1,81
2.	Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	88	88,01
3.	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	93	99,49
		Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	22,50	20,02
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	74	76,06
4.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubungnya konaktivitas antar wilayah	94,28	96,98
5.	Meningkatnya kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	66,64	73
6.	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	50	53,06
7.	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW	100	100

a. Sasaran 1 : Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi

Indikator : Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 2,56% untuk indikator Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan. Adapun realisasinya adalah sebesar 1,81%. Berdasarkan hal tersebut, maka Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan untuk tahun 2022 adalah sebesar 70,70% dari target.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan

Indikator : Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 88% untuk indikator Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Adapun realisasinya adalah sebesar 88,01%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan untuk tahun 2022 adalah sebesar 101,01% dari target.

c. Sasaran 3 : Meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat

Indikator 1 : Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 93% untuk indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik. Adapun realisasinya adalah sebesar 99,49%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik untuk tahun 2022 adalah sebesar 106,98% dari target.

Indikator 2 : Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 22,50% untuk indikator Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar. Adapun realisasinya adalah sebesar 20,02%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar untuk tahun 2022 adalah sebesar 88,98% dari target.

Indikator 3 : Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 74% untuk indikator Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik. Adapun realisasinya adalah sebesar 76,06%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik untuk tahun 2022 adalah sebesar 102,78% dari target.

d. Sasaran 4 : Meningkatkan konektivitas antar wilayah

Indikator : Persentase terhubungnya konaktivitas antar wilayah

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 94,28% untuk indikator Persentase terhubungnya konaktivitas antar wilayah. Adapun realisasinya adalah sebesar 96,98%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase terhubungnya konaktivitas antar wilayah untuk tahun 2022 adalah sebesar 102,86% dari target.

e. Sasaran 5 : Meningkatkan kondisi jalan mantap

Indikator : Persentase panjang jalan kondisi mantap

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 66,64% untuk indikator Persentase panjang jalan kondisi mantap. Adapun realisasinya adalah sebesar 73%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase panjang jalan kondisi mantap untuk tahun 2022 adalah sebesar 109,54% dari target.

f. Sasaran 6 : Meningkatkan pelayanan sistem irigasi

Indikator : Indeks kinerja sistem irigasi

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 50% untuk indikator Indeks kinerja sistem irigasi. Adapun realisasinya adalah sebesar 53,06%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Indeks kinerja sistem irigasi untuk tahun 2022 adalah sebesar 106,12% dari target.

g. Sasaran 7 : Meningkatkan pembangunan yang sesuai tata ruang

Indikator : Persentase pemanfaatan tata ruang wiayah sesuai RTRW

Tahun 2022 DPUTR Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk indikator Persentase pemanfaatan tata ruang wiayah sesuai RTRW. Adapun realisasinya adalah sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase pemanfaatan tata ruang wiayah sesuai RTRW untuk tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dari ketujuh belas tujuan TPB tersebut, DPUTR bertanggung jawab dalam pencapaian 1 (satu) tujuan yaitu Tujuan 6 yaitu Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Indikator yang terkait dengan tujuan SDG's tersebut adalah Presentase Penduduk yang memiliki Akses Air Minum dan Persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik layak. Sedangkan Indikator untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Yang dapat digambarkan dalam tabel capaian SPM sebagai berikut :

capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	100	1.348.191	1.531.919	88,01
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	1.462.829	1.531.919	95,49

Sumber : SPM E-Jateng, 2022

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DPUTR Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya.

Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 ton);
2. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian golongan C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
3. Adanya bencana alam (longsor), ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
4. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun pedesaan;
5. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun pedesaan;
6. Adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
7. Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi;
8. Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;
9. Belum adanya regulasi yang mengatur drainase kabupaten;
10. Data base drainase kabupaten masih terbatas di wilayah perkotaan Pemalang dan Taman;
11. Sedimentasi di sepanjang saluran irigasi dan sungai;
12. Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai;
13. Mekanisme penyusunan hingga penetapan perencanaan penataan ruang yang kurang efektif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan DPUTR Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	8
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2 Mandat Kinerja, dan Struktur Organisasi	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	12
1.4 Isu-Isu Strategis	15
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	16
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	20
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	27
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	28
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	29
3.2 Akuntabilitas Anggaran	46
BAB 4 PENUTUP	48
L A M P I R A N	50
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	51
Lampiran 2 Indeks Kinerja Utama DPU TR Kabupaten Pematang Jaya.....	53
Lampiran 3 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2022.....	54

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan pada DPUTR Kab. Pemalang.....	16
Tabel I.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon pada DPUTR Kab. Pemalang.....	17
Tabel I.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Gol/Pangkat pada DPUTR Kab. Pemalang.....	17
Tabel I.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal pada DPUTR Kab. Pemalang...17	
Tabel I.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin pada DPUTR Kab. Pemalang (ASN dan Non ASN).....	18
Tabel I.6 Fasilitas dan Peralatan pada DPUTR Kab. Pemalang.....	18
Tabel I.7 Anggaran Tahun 2022 pada DPUTR Kab. Pemalang.....	19
Tabel II.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DPUTR Kab. Pemalang, 2021-2026	20
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
Tabel II.3.1 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	23
Tabel II.3.2 Struktur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Th. 2022.....	26
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022	27
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	30
Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.....	31
Tabel III.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.....	31
Tabel III.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.....	32
Tabel III.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.....	33
Tabel III.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.....	34
Tabel III.8 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6.....	34
Tabel III.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 7.....	45
Tabel III.10 Kesesuaian RTRW.....	45
Tabel III.11 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya terhadap Capaian Sasaran Strategis pada DPUTR Kab. Pml.....	47

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja dan Struktur Organisasi pada DPUTR Kab. Pematang.....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada DPUTR Kab. Pematang.....	12
Gambar II.1. Sistem SAKIP.....	28
Gambar II.2. Sistem eMonev.....	28

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. Cascading Kinerja
2. Mandat Kinerja Dan Struktur Organisasi
3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
4. Isu-Isu Strategis
5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

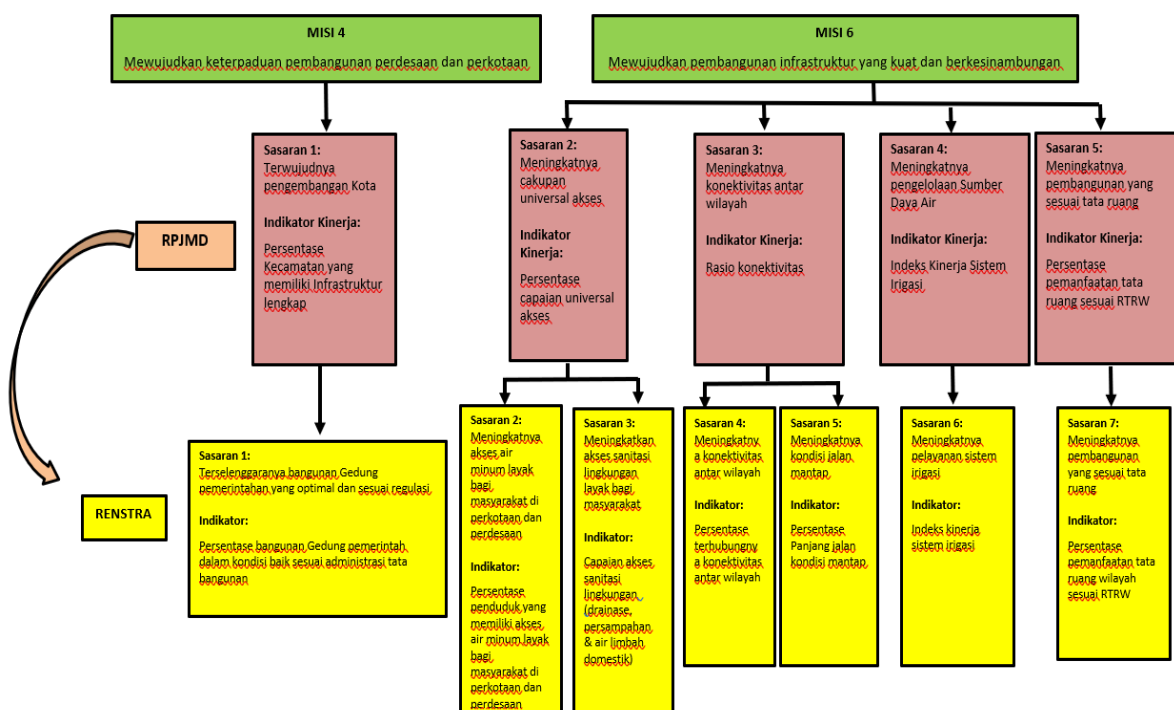
Adapun tujuan penyusunan LKJIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar I.1 Cascading Kinerja

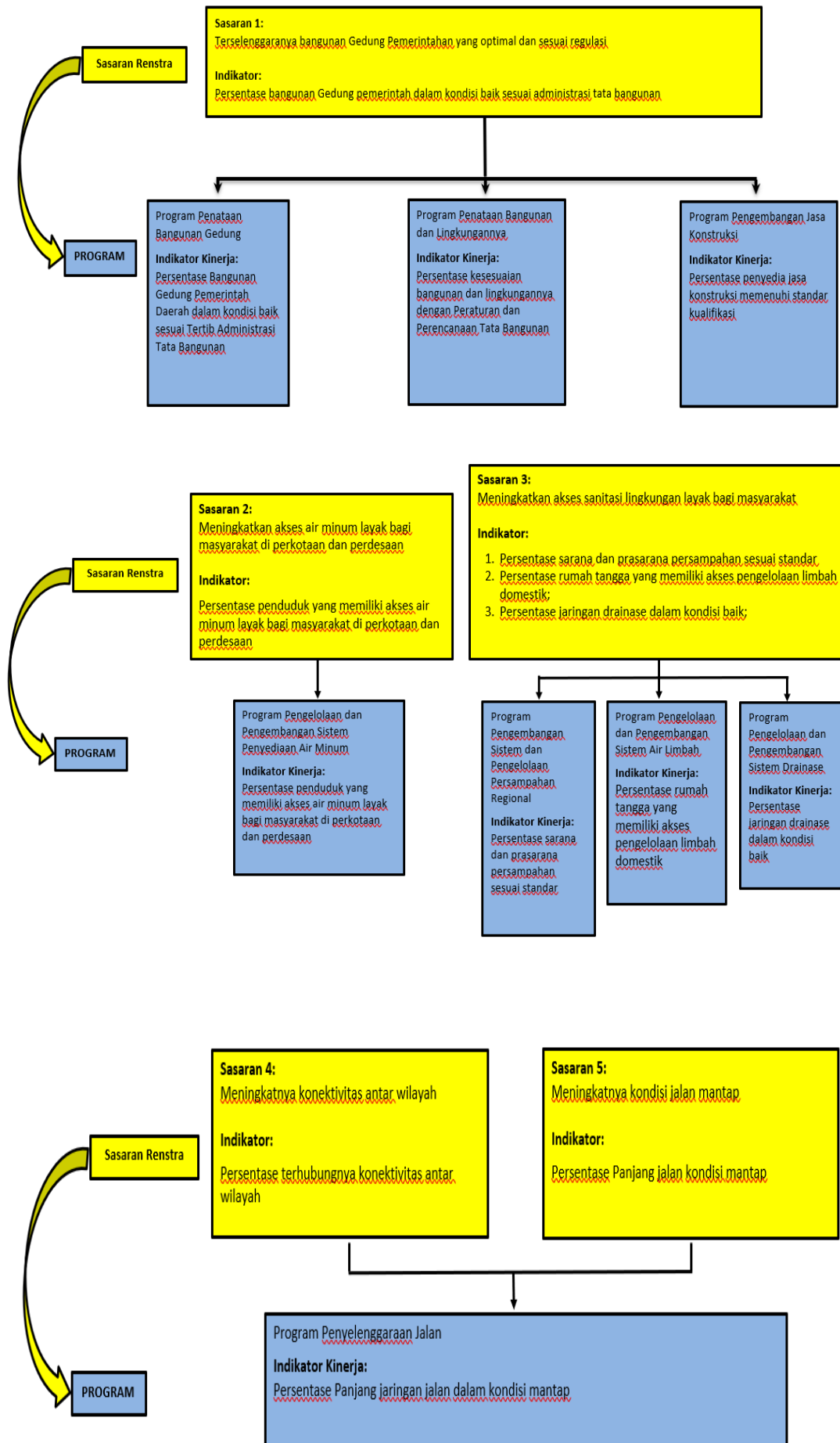


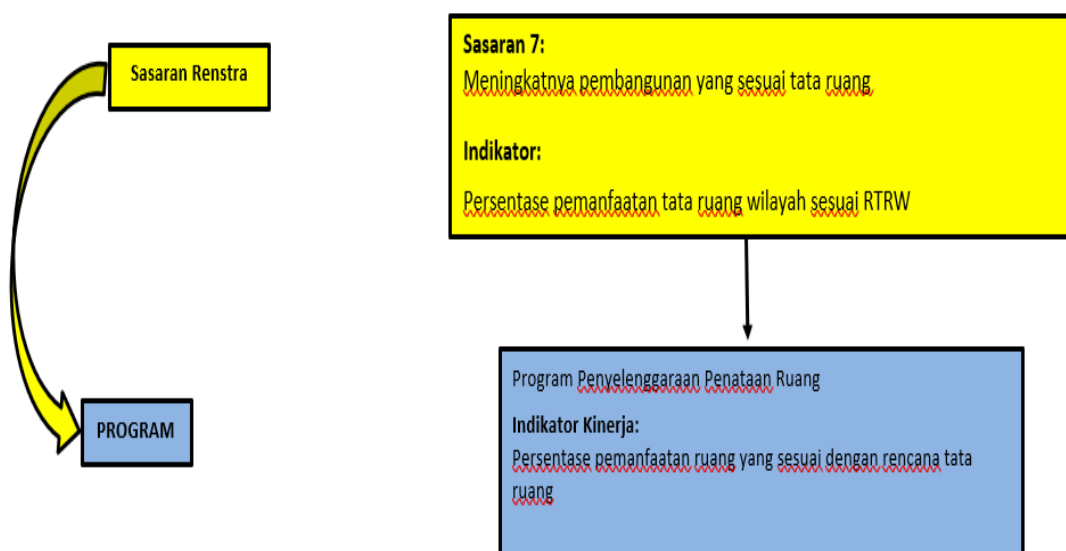
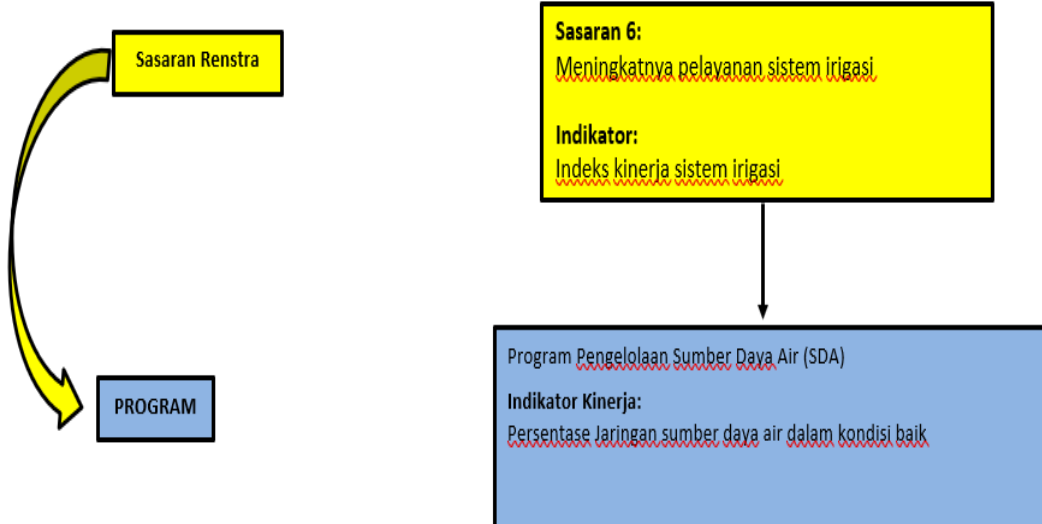
Sumber: Renstra Dinas DPUWR 2021-2026

1.2 Mandat Kinerja dan Struktur Organisasi

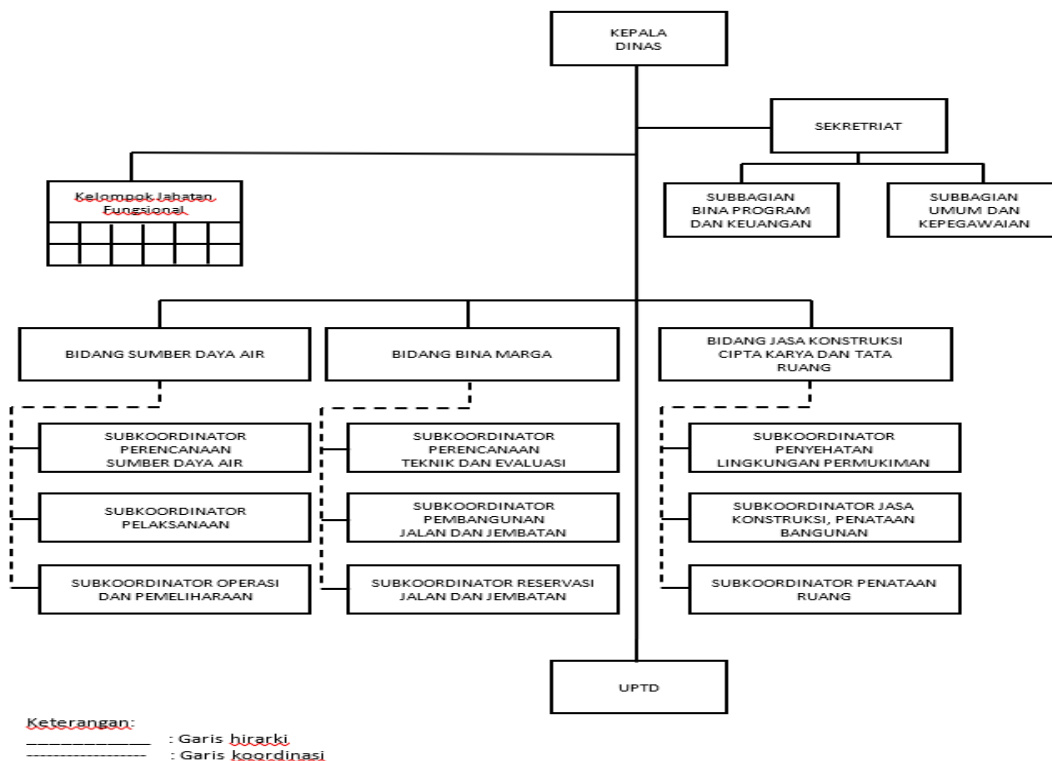
Hubungan antara mandat kinerja dan desain struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang





SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG



Sumber: Perbup No. 72 Th. 2021

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dari tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sebagai berikut

1. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa konstruksi, cipta karva dan tata ruang;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 188.4/239 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dengan komposisi sebagai berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang

JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang	
2. Sekretaris 1) Kasubag Bina Program dan Keuangan 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Dibawah Kasubag Bina Program dan Keuangan 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2) Bendahara 3) Pranata laporan Keuangan 4) Verifikator Keuangan 5) Pengelola Keuangan 6) Pengadministrasi Keuangan 7) pengadministrasi Perencanaan dan Program 2. Dibawah Kasubag Umum 1) Analis Tata Usaha 2) Pengelola barang Milik Negara 3) Pengadministrasi Kepegawaian 4) Pengadministrasi Umum 5) Pengemudi 6) Petugas Keamanan 7) Pramuka Bakti
3. Kabid Sumber Daya Air 1) Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air	3. Dibawah Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air 1) JF Teknik Pengairan Ahli Pertama 2) JF Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan

JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
<p>2) Subkoordinator Pelaksanaan</p> <p>3) Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan</p>	<p>3) JF Teknik Pengairan Pelaksana</p> <p>4) Analis Sumber daya Air</p> <p>5) Pengelola Irigasi</p> <p>4. Dibawah Subkoordinator Pelaksanaan</p> <p>1) JF Teknik Pengairan Ahli Pertama</p> <p>2) JF Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan</p> <p>3) JF Teknik Pengairan Pelaksana</p> <p>4) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air</p> <p>5) Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air</p> <p>5. Dibawah Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan</p> <p>1) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air</p> <p>2) Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi</p>
<p>4. Kabid Bina Marga</p> <p>1) Subkoordinator Perencanaan Teknik dan Evaluasi</p> <p>2) Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>3) Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan</p>	<p>6. Dibawah Subkoordinator Perencanaan Teknik dan Evaluasi</p> <p>1) JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pratama</p> <p>2) JF Teknik Jalan dan Jembatan Penyedia</p> <p>3) Analis Jalan dan Jembatan</p> <p>4) Pranata Pengelolaan Leger Jalan</p> <p>7. Dibawah Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>1) JF Teknik Jalan dan Jembatan Penyedia</p> <p>2) JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana lanjutan</p> <p>3) JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana</p> <p>4) Pemeriksa Jalan dan Jembatan</p> <p>5) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan</p> <p>8. Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan</p> <p>1) JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan</p> <p>2) JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana</p> <p>3) Pemeriksa Jalan dan Jembatan</p> <p>4) Pengelola Pemelihara Jalan</p>
<p>5. Kabid Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang</p> <p>1) Subkoordinator Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum</p> <p>2) Subkoordinator Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman</p> <p>3) Subkoordinator Penataan Ruang</p>	<p>9. Dibawah Subkoordinator Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum</p> <p>1) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman</p> <p>2) Pengelola Penyehatan Lingkungan</p> <p>10. Dibawah Subkoordinator Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman</p> <p>1) JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama</p> <p>2) Analis Bangunan Gedung dan Permukiman</p> <p>3) Pengelola Jasa Konstruksi</p> <p>4) Teknisi Gedung atau Bangunan</p> <p>11. Dibawah Subkoordinator Penataan Ruang</p> <p>1) JF Penata Ruang Ahli Pertama</p> <p>2) Analis Tata Ruang</p> <p>3) Pengelola Tata Ruang</p>

JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
6. Kepala Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium	12. Dibawah Kepala Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium 1) Pemeriksa Jalan dan Jembatan 2) Pemelihara Peralatan 3) Operator Alat Berat 4) Pengadministrasi Keuangan 5) Pengadministrasi Umum
7. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah I	13. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah I 1) Pemeriksa Jalan dan Jembatan 2) Pengolah sarana dan Prasarana Pengairan 3) Pemelihara Jalan 4) Pengadministrasi Keuangan 5) Pengadministrasi Umum 6) Teknisi Air 7) Penjaga Pintu Air 8) Petugas Keamanan 9) Pramuka Bakti
8. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah II	14. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. II 1) Pengolah sarana dan Prasarana Pengairan 2) Pemelihara Jalan 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengadministrasi Umum 5) Teknisi Air 6) Penjaga Pintu Air 7) Petugas Keamanan 8) Pramuka Bakti
9. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah III	15. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. III 1) Pengolah sarana dan Prasarana Pengairan 2) Pemelihara Jalan 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengadministrasi Umum 5) Teknisi Air 6) Penjaga Pintu Air 7) Petugas Keamanan 8) Pramuka Bakti
10. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. IV	16. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. III 1) Pengolah sarana dan Prasarana Pengairan 2) Pemelihara Jalan 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengadministrasi Umum 5) Teknisi Air 6) Penjaga Pintu Air 7) Petugas Keamanan 8) Pramuka Bakti
11. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. V	17. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. V 1) Pemeriksa Jalan dan Jembatan 2) Pengolah sarana dan Prasarana Pengairan 3) Pemelihara Jalan 4) Pengadministrasi Keuangan 5) Pengadministrasi Umum 6) Teknisi Air 7) Penjaga Pintu Air

JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
	8) Petugas Keamanan 9) Pramuka Bakti
12. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. VI	18. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. VI 1) Pengolah sarana dan Prasarana Pengairan 2) Pemelihara Jalan 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengadministrasi Umum 5) Teknisi Air 6) Penjaga Pintu Air 7) Petugas Keamanan 8) Pramuka Bakti
13. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. VII	19. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. VII 1) Pengolah sarana dan Prasarana Pengairan 2) Pemelihara Jalan 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengadministrasi Umum 5) Teknisi Air 6) Penjaga Pintu Air 7) Petugas Keamanan 8) Pramuka Bakti
14. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. VIII	20. Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wil. VII 1) Pengolah sarana dan Prasarana Pengairan 2) Pemelihara Jalan 3) Pengadministrasi Keuangan 4) Pengadministrasi Umum 5) Teknisi Air 6) Penjaga Pintu Air 7) Petugas Keamanan 8) Pramuka Bakti

1.4 Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Visi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**. Dari ke 6 (enam) misi yang ditempuh untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang tersebut di atas, yang terkait dengan tugas dan fungsi DPUTR Kabupaten Pemalang adalah **Misi ke-4 (empat) dan ke-6 (enam)** yaitu **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan dan Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.**

Dalam melaksanakan misi tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata. Berdasarkan permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, yang mempunyai dampak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerusakan jaringan irigasi induk dan sekunder pada Daerah Irigasi kewenangan Pusat (Comal dan Sungapan);
2. Perlu peningkatan kinerja pengelolaan SDA;

3. Perlu adanya penanganan rob dan erosi pantai di Kabupaten Pemalang;
4. Perlu adanya peningkatan bangunan konservasi muara sungai sebagai alur pelayaran dan pemeliharannya;
5. Perlu adanya Pengendalian daya rusak dan pendayagunaan Sungai Comal, Sungai Genteng/Sungai Layang ;
6. Masih banyak bangunan Gedung yang belum tertib dan andal;
7. Masih rendahnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang;
8. Penyediaan air baku yang aman dan layak yang memenuhi syarat untuk air bersih/air minum serta menjaga kelestarian sumber mata air yang optimal;
9. Belum optimalnya akses pelayanan air bersih;
10. Belum optimalnya akses pelayanan sanitasi;
11. Perlu adanya peningkatan konstruksi jalan dan jembatan di kawasan wisata, industri dan daerah rawan bencana.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan DPUTR Kabupaten Pemalang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pegawai ASN dan 160 (seratus enam puluh) pegawai Non ASN. Adapun gambaran potensi pegawai DPU TR adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUTR sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada DPU TR Kabupaten Pemalang

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1 (Plt)
2	Sekretaris	1
	1) Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan	1
	2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1
3	Kepala Bidang Sumberdaya Air	1
	1) Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Air	1
	2) Sub Koordinator Pelaksanaan	1
	3) Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan	1
4	Kepala Bidang Bina Marga	1
	1) Sub Koordinator Perencanaan Teknik dan Evaluasi	1
	2) Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	1
	3) Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	1
5	Kepala Bidang Jasa Konstruksi Cipta Karya dan Tata Ruang	1
	1) Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum	1
	2) Sub Koordinator Jasa Konstruksi Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman	1
	3) Sub Koordinator Penataan Ruang	1
6	UPTD	9
Jumlah		25

Sumber Data : DPUTR Kab. Pemalang 2022

2. Pegawai Berdasarkan Eselon

Gambaran pegawai di DPUTR Kabupaten Pemalang berdasarkan eselon adalah sebagai berikut.

**Tabel I.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon pada
DPUTR Kabupaten Pemalang**

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon IIb	0
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	3
4	Eselon IVa	2
5	Eselon IVb	9
Jumlah		15

Sumber Data : DPUTR Kab. Pemalang 2022

3. Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai DPUTR Kabupaten Pemalang berdasarkan golongan pada di DPUTR Kabupaten Pemalang sebagian besar adalah IVa yaitu sebanyak 10 pegawai. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat dari **141** pegawai adalah sebagai berikut.

**Tabel I.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat
Pada DPUTR Kabupaten Pemalang**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV-c	0
2	Golongan IV-b	1
3	Golongan IV-a	3
4	Golongan III-d	9
5	Golongan III-c	7
6	Golongan III-b	16
7	Golongan III-a	17
8	Golongan II-d	22
9	Golongan II-c	43
10	Golongan II-b	11
11	Golongan II-a	8
12	Golongan I-d	4
13	Golongan I-c	0
14	Golongan I-b	0
15	Golongan I-a	0
Jumlah		141

Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang, 2022

4. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan dan Pengelompokan Berdasarkan Jensi Kelamin SDM pada DPUTR Kabupaten Pemalang dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel I.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
pada DPUTR Kab. Pemalang**

No	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	Sarjana (S2)	8	1
2	Sarjana (S1)	27	37
4	D IV	-	0
5	D III	7	6
6	D I	0	1
6	SLTA	75	96
7	SLTP	20	15
8	SD	4	4
Jumlah		141	160

Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang, 2022

Tabel I.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada DPUTR Kabupaten Pemalang (ASN dan Non ASN)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	Laki-Laki	123	123
2	Perempuan	18	37
Jumlah		141	160

Sumber Data: DPUTR Kab. Pemalang, 2022

Fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh DPUTR Kabupaten Pemalang dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel I.6. Fasilitas dan Peralatan pada DPUTR Kabupaten Pemalang

No.	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah barang	Kondisi				Harga (Ribuan)
					Luas	Baik	Kurang baik	Rusak berat	
1	01		Tanah						
		01	Tanah	867	8.538.007,26	-	-	-	486.227.774,75
			jumlah KIB A	867	8.538.007,26	-	-	-	486.227.774,75
2	02		Peralatan & mesin						
		02	Alat - alat Besar	35	-	20	9	6	12.139.539,20
		03	Alat - alat Angkutan	134	-	104	20	10	4.923.086,15
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	77	-	60	10	7	635.232,44
		05	Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	864	-	663	97	104	4.836.772,28
		07	Alat Studio dan Komunikasi	102	-	77	15	10	954.586,44
		08	Alat - alat Kedokteran	1	-	1	-	-	1.177,20
		09	Alat Laboratorium	10	-	10	-	-	11.984,25
		10	Alat - alat Persenjataan / Keamanan	20	-	20	-	-	1.000,00
			jumlah KIB B	1243	-	955	151	137	23.503.377,96
3	03		Gedung & bangunan						
		11	Gedung & bangunan	110	4.616				131.893.049,97
		12	Monumen	-	-	-	-	-	
			jumlah KIB C	110	4.616				131.893.049,97
4	04		Jalan dan Jembatan						
		14	Jalan dan Jembatan	509	3.044.435,27	-	-	-	1.043.684.604,00
		15	Instalasi	-	-	-	-	-	-
		16	Jaringan	4	31	2	2	-	345.275,00
			jumlah KIB D	513	3.044.466,27	2	2	-	1.044.029.879,00
5	05		Aset Tetap Lainnya						
		16	Barang Bercorak dan Kebudayaan	36	-	30	3	3	4.767,00
		17	Buku dan Perpustakaan	146	-	102	30	14	33.732,26

No.	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah barang	Kondisi				Harga (Ribuan)
					Luas	Baik	Kurang baik	Rusak berat	
		18	Hewan Ternak dan Tanaman	15	-	10	3	2	161.110,50
			jumlah KIB E	197	-	142	36	19	199.609,76
6	06	19	Kontruksi dalam pekerjaan	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: DPU TR Kab. Pemalang, 2022

Tabel I.7 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	157.000.000	180.000.000	23.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	157.000.000	180.000.000	23.000.000
			Jumlah Pendapatan	157.000.000	180.000.000	23.000.000
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	74.116.567.000	102.298.821.600	28.182.254.600
5	1	01	Belanja Pegawai	18.393.316.000	17.012.502.000	(1.380.814.000)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.684.251.000	78.487.619.600	28.803.368.600
5	1	05	Belanja Hibah	6.039.000.000	6.798.700.000	759.700.000
5	2		BELANJA MODAL	33.260.476.000	66.360.976.400	33.100.500.400
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.276.000	695.776.400	585.500.400
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan	115.000.000	200.000.000	85.000.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.035.200.000	65.465.200.000	32.430.000.000
			Jumlah Belanja	107.377.043.000	168.659.798.000	61.282.755.000
			Total Surplus/(Defisit)	(107.220.043.000)	(168.479.798.000)	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPU TR Kab. Pemalang Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang berasal dari APBD Kabupaten Pemalang dan Dana Alokasi Khusus. Terlihat pada tabel I.7, untuk tahun 2022 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang semula Rp. 107.377.043.000,-- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 168.659.798.000,-- atau bertambah Rp. 61.282.755.000,--.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah
3. Kebijakan
4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dari keenam misi yang ditempuh untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah :

1. Misi 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Misi 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Misi 4 dan Misi 6 adalah misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DPU TR sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Maka selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, 2021 – 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line	TARGET TAHUNAN					Target Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Misi 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan											
1.	Mewujudkan pengembangan kota	Terselenggaranya pembangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	1,76	2,56	3,36	4,16	4,96	5,76	5,76
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan											
2.	Meningkatkan cakupan akses air minum	Meningkatnya akses air minum layak bagi	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak	%	87	88	89	90	91	92	92

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line	TARGET TAHUNAN					Target Akhir	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra
		masyarakat di perkotaan dan perdesaan	bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan									
3.	Meningkatkan sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	% Akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	61,09	62,54	63,89	65,24	66,58	67,78	67,78	
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	91,70	93	94	95	96	97	97	
			Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	19,58	20,62	21,67	22,72	23,76	24,36	24,36	
			Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	72	74	76	78	80	82	82	
4.	Meningkatkan konektivitas jaringan jalan kabupaten	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah	%	93,7	94,28	95,77	97,27	98,74	100	100	
5.		Meningkatnya kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	63,65	66,64	69,53	72,52	75,41	78,40	78,40	
6.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	%	48	50	52	53	54	55	55	
7.	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Optimalisasi Pengawasan Pembangunan Gedung melalui Rekomendasi PBG dan SLF	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi
2.	Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum	Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum sejumlah 2.600 SR (\pm 13.000 jiwa) per tahun
3.	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana air limbah, sarana prasarana persampahan dan drainase perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan sarana prasarana air limbah domestik terpusat sejumlah 500 SR (\pm 2.500 jiwa) per tahun - Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana persampahan (TPS/TPST/TPS3R/IPLT) sejumlah 5 unit per tahun - Pembangunan dan Rehabilitasi drainase perkotaan sepanjang 7.550 meter pertahun
4.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan yang belum terkoneksi	Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan yang belum terkoneksi
5.	Meningkatnya kondisi jalan mantap	Melaksanakan kegiatan peningkatan / rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan	Melaksanakan kegiatan peningkatan/rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sesuai daftar skala prioritas
6.	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sumber daya manusia bidang SDA 2. Modernisasi pengelolaan sistem data dan informasi Sumber Daya air 3. Perencanaan berbasis spasial dan intergratif 4. Optimalisasi organisasi Pengelola Jaringan Sumber Daya Air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan Diklat teknis pada Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta 2. Pemasangan Alat Pengukur otomatis dan Pembuatan aplikasi pemantau real time data hidrologi dan meteorologi 3. Merencanakan Program / kegiatan berdasarkan survei kinerja jaringan Sumber daya Air dalam satu DAS / catchment 4. Meningkatkan Kinerja Organisasi P3A dan memberdayakan masyarakat pemanfaat Sumber Daya Air dalam pengelolaannya

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
7.	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	1. Pengembangan Pusat Pelayanan Guna Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Perkembangan wilayah yang sesuai dengan Perda RTRW 2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produk produk	Pelaksanaan kegiatan penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2022 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	1.1.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.355.000.000	7.561.400.000	1.206.400.000
	1.1.1.Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6.355.000.000	7.561.400.000	1.206.400.000
	1.1.1.1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100.000.000	245.600.000	145.600.000
	1.1.1.2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.751.000.000	6.222.400.000	471.400.000
	1.1.1.3. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	504.000.000	1.093.400.000	589.400.000
	1.2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	225.000.000	578.800.000	353.800.000
	1.2.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	578.800.000	353.800.000
	1.2.1.1. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	225.000.000	578.800.000	353.800.000
	1.3. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	80.000.000	125.000.000	45.000.000
	1.3.1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	125.000.000	45.000.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.3.1.1. Penyusunan Data dan Informasi ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	80.000.000	125.000.000	45.000.000
2. Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	2.1.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.299.794.000	3.771.201.000	471.407.000
	2.1.1. <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.299.794.000	3.771.201.000	471.407.000
	2.1.1.1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	660.000.000	660.000.000	-
	2.1.1.2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.639.794.000	3.111.201.000	471.407.000
3. Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan	3.1.PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	200.000.000	1.582.812.000	1.382.812.000
	3.1.1. <i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	200.000.000	1.582.812.000	1.382.812.000
	3.1.1.1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100.000.000	1.300.000.000	1.200.000.000
	3.1.1.2. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100.000.000	282.812.000	182.812.000
	3.2.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.374.694.000	4.355.044.000	(1.019.650.000)
	3.2.1.<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.374.694.000	4.355.044.000	(1.019.650.000)
	3.2.1.1.Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5.374.694.000	4.355.044.000	(1.019.650.000)
	3.3.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	410.000.000	820.000.000	410.000.000
	3.3.1.<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	410.000.000	820.000.000	410.000.000
	3.3.1.1.Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	250.000.000	450.000.000	200.000.000
3.3.1.2.Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	160.000.000	370.000.000	210.000.000	
4. Meningkatnya konektivitas antar wilayah 5. Meningkatnya kondisi jalan mantap	4.1.PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	65.887.200.000	121.908.380.000	56.021.180.000
	4.1.1.<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	65.887.200.000	121.908.380.000	56.021.180.000
	4.1.1.1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	720.000.000	870.000.000	150.000.000
	4.1.1.2. Pelebaran Jalan Menuju Standar	2.140.000.000	2.140.000.000	-
	4.1.1.3. Rekonstruksi Jalan	30.935.200.000	63.860.064.000	32.924.864.000
	4.1.1.4. Pemeliharaan Rutin Jalan	31.702.000.000	53.140.864.000	21.438.864.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	4.1.1.5. Pembangunan Jembatan	390.000.000	615.000.000	225.000.000
	4.1.1.6. Pembangunan Rutin Jembatan	0	1.282.452.000	1.282.452.000
6. Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	5.1.PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.702.039.000	5.377.039.000	1.675.000.000
	5.1.1.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	831.705.000	1.334.745.000	503.040.000
	5.1.1.1.Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	31.705.000	211.705.000	180.000.000
	5.1.1.2.Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200.000.000	200.000.000	-
	5.1.1.3.Normalisasi/Restorasi Sungai	600.000.000	923.040.000	323.040.000
	5.1.2.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota	2.870.334.000	4.042.294.000	1.171.960.000
	5.1.2.1.Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	218.295.000	639.611.000	421.316.000
	5.1.2.2.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.452.039.000	2.837.683.000	385.644.000
	5.1.2.3.Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000	565.000.000	365.000.000
7. Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	6.1.PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	200.000.000	373.800.000	173.800.000
	6.1.1.Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab./Kota	30.000.000	30.000.000	-
	6.1.1.1.Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	30.000.000	30.000.000	-
	6.1.2.Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	253.400.000	153.400.000
	6.1.2.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100.000.000	253.400.000	153.400.000
	6.1.3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	90.400.000	20.400.000
	6.1.3.1.Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	70.000.000	90.400.000	20.400.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		85.733.727.000	146.453.476.000	60.719.749.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pematang Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program, Kegiatan , Sub kegiatan dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	103.500.000	101.500.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	103.500.000	101.500.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.393.316.000	17.012.502.000	(1.380.814.000)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.393.316.000	17.012.502.000	(1.380.814.000)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.000.000	233.150.000	201.150.000
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.000.000	233.150.000	201.150.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.525.000	806.782.400	523.257.000
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.050.000	348.782.400	280.732.400
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	85.000.000	25.000.000
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	50.000.000	20.000.000
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000	11.500.000	1.000.000
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.975.000	306.500.000	196.525.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.526.000	292.404.000	287.878.000
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		276.000.000	276.000.000
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.526.000	16.404.000	11.878.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.529.154.000	2.905.388.600	376.234.600
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.000.000	325.430.000	61.430.000
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	140.469.600	70.469.600
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.195.154.000	2.439.489.000	244.335.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.795.000	852.595.000	453.800.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.000.000	210.800.000	93.800.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	179.845.000	239.845.000	60.000.000
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.400.000	244.400.000	200.000.000
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.550.000	157.550.000	100.000.000
Total Anggaran Pendukung		21.643.316.000	22.206.322.000	563.006.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pematang Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala DPU TR Kabupaten Pemalang Tahun 2022

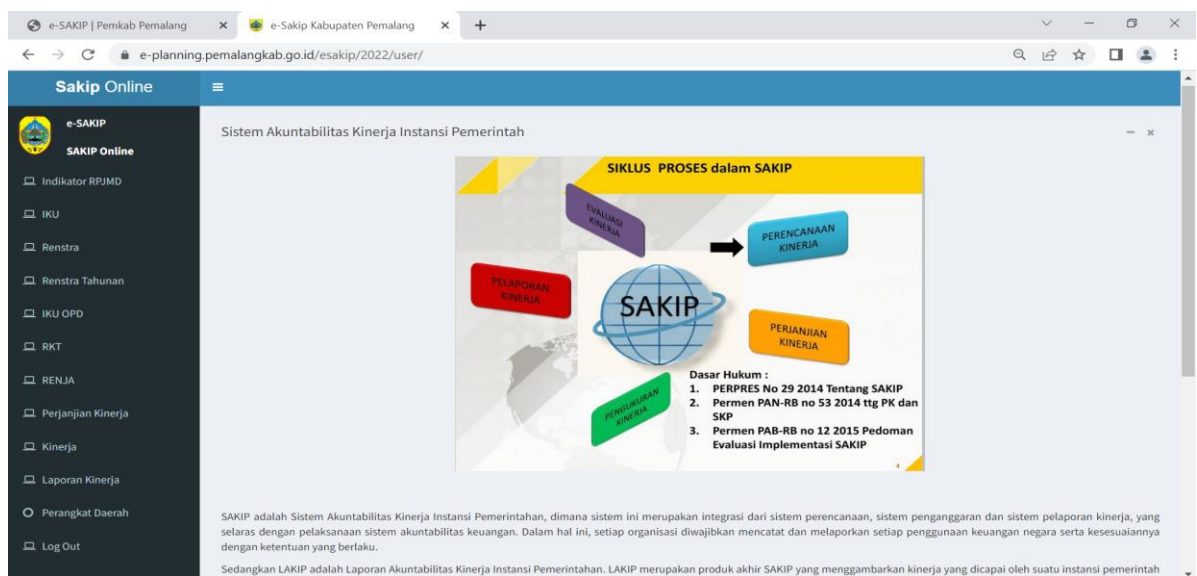
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
1	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	2,56	1,75	2	2,25	2,56
2	Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	%	88	86	86,50	87	88
3	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	93	92	92,50	92,75	93
		Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	22,5	19,43	20	21	22,50
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	74	72	73	73,5	74
4	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah	%	94,28	92	93	94	94,28
5	Meningkatnya kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	66,64	63	64	65	66,64

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
6	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	%	50	48	49	49,5	50
7	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wiyah sesuai RTRW	%	100	100	100	100	100

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Gambar II.1. Sistem SAKIP



Sumber: <https://e-planning.pemalangkab.go.id/esakip/2022/>

2. Sistem E-Monev adalah Sistem untuk memantau laporan kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan di setiap bulannya.

Gambar II.2. Sistem eMonev



Sumber: <https://adpem.pemalangkab.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

➤ **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

➤ **CAPAIAN INDIKATOR SASARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Capaian Kinerja Sasaran :} \\ &= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\% \end{aligned}$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi	Kinerja (%)		
1.	Terseleggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	2,56	1,81	70,70	5,76	31,42
2.	Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	88	88,01	100,01	92	95,66
3.	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	93	99,49	106,98	97	102,56
		Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	22,5	20,02	88,98	55	36,40
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	74	76,06	102,78	82	92,75
4.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah	94,28	96,98	102,86	100	96,98
5.	Meningkatnya kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	66,64	73	109,54	78,40	93,11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi	Kinerja (%)		
6.	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	50	53,06	106,12	55	96,47
7.	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wiayah sesuai RTRW	100	100	100	100	100

Sumber: DPU TR Kab. Pemalang Tahun 2022

Penjelasan tentang sasaran, didukung oleh berapa indikator.

Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Sasaran Strategis 1 : Terseleggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2022
		1.	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	-	1,27	1,46	2,56	1,81	70,70

Indikator kinerja **Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Jumlah total bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik ÷ total bangunan gedung pemerintahan) x 100%**. Di tahun 2022 realisasi bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan sebesar 1,81%. Realisasi ini diperoleh dari pembagian bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sebanyak 114 unit dan jumlah total bangunan gedung pemerintahan sebanyak 6292 unit.

Adapun keberhasilan kinerja dalam hal pelaksanaan pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan oleh DPUTR Kab. Pemalang adalah terpenuhinya target waktu/ time line pengadaan sesuai rencana, tidak terdapat gagal tender/pengulangan dalam pengadaan, serta maksimalisasi perencanaan pembangunan dan pengawasan konstruksi agar tepat waktu, tepat mutu.

Hal yang masih menjadi tantangan pemerintah kabupaten dalam hal pencapaian sasaran kinerja adalah pembangunan gedung kantor yang menjadi objek sasaran pencapaian tidak secara khusus dilaksanakan oleh DPUTR selaku dinas teknis, namun di tiap OPD non teknis juga melakukan pembangunan gedung kantor. Adapun salah satu kendala adalah pendataan bangunan gedung kantor untuk keseluruhan gedung kantor yang tercatat menjadi milik Pemda Pemalang.

Tabel III.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2022
1.	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	96,21	86,20	90,66	88	88,01	100,01	92	95,66

Indikator kinerja **Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan** dihitung dengan menggunakan rumus = $(\text{Jumlah penduduk terlayani akses air bersih} \div \text{Jumlah penduduk Pemalang Tahun 2022}) \times 100\%$. Di tahun 2022 realisasi Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum sebesar 88,01 persen. Realisasi ini diperoleh dari pembagian Jumlah penduduk terlayani akses air bersih sebesar 1.348.191 Jiwa dan Jumlah penduduk Pemalang Tahun 2022 sebesar 1.531.919 jiwa.

Realisasi di tahun 2022 tersebut lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar 90,66 persen. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan jumlah penduduk yang bertambah dari 1.471.489 jiwa menjadi 1.531.919 jiwa sehingga indikator penyebut sebagai pembagi meningkat yang berakibat hasil prosentase menurun.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prosentase laju pertumbuhan jumlah penduduk (jiwa) sangat berpengaruh pada pencapaian akses air minum, sehingga pada saat perencanaan penganggaran juga perlu memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk tersebut agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja sesuai target. Hal yang telah dilakukan antara lain dengan keterbatasan anggaran yang ada tetap dioptimalkan secara bertahap untuk pencapaian target output, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi/lainnya untuk dapat ikut mengintervensi akses air minum, dan mendorong pemicuan dan pemacuan kepada masyarakat maupun KPSPAMS di perdesaan agar ikut serta mengembangkan akses air minum dari sarana dan prasarana yang telah disediakan.

Tabel III.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2022
1.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	90,38	92,82	94,61	93	99,45	106,93	97	102,52
2.	Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	NA	18	19,43	22,5	20,02	88,98	55	36,40
3.	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	71,07	72,16	75,20	74	76,06	102,78	82	92,75

Indikator kinerja **Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik** dihitung dengan menggunakan rumus = $(\text{Jumlah rumah tangga yg terlayani akses air limbah domestik} \div \text{Jumlah penduduk Pemalang Tahun 2022}) \times 100\%$. Di tahun 2022 realisasi rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air limbah sebesar 99,49 persen. Realisasi ini diperoleh dari pembagian Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 487.609 KK dengan Jumlah penduduk Pemalang Tahun 2022 sebesar 490.289 KK. Realisasi di tahun 2022 tersebut lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar 94,61 persen. Meningkatnya kinerja akses pengelolaan limbah domestik dikarenakan tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pembangunan infrastruktur air limbah bagi masyarakat yang belum memiliki akses yang layak. Didukung pula dengan adanya pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat melakukan analisa terkait perilaku mereka dalam melakukan buang air besar dan memicu masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan.

Indikator kinerja **Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Jumlah sarana persampahan (TPA/TPS/TPST/TPS3R) yang terbangun ÷ Jumlah total kebutuhan ideal sarpras persampahan) x 100%**. Pada tahun 2022, realisasi indikator **Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar** sebesar 20,02 persen, dengan target 22,50%. Realisasi ini diperoleh dari pembagian jumlah sarana persampahan sebesar 134 unit dan jumlah total kebutuhan ideal sarpras persampahan sebesar 669 unit. Persentase sarana dan prasarana persampahan tidak tercapai atau tidak memenuhi target disebabkan pembelian mesin pencacah organik dan an organik tidak terbeli, hal ini dikarenakan harga yang terlalu tinggi.

Akan tetapi dengan adanya infrastruktur persampahan berupa TPS3R yang telah terbangun di tahun 2022 juga sudah termasuk mesin pencacah organik dan an organik. Adapun TPS3R merupakan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle (mengurangi – menggunakan – daur ulang) serta melakukan pendekatan pengelolaan 3R mulai dari menjemput sampah dari tiap rumah, pemilah sampah, pengelolaan sampah organik yang akan dijadikan kompos dan pengolahan botol plastic (sampah an organik) menjadi biji plastik.

Indikator kinerja **Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Panjang drainase dalam kondisi baik ÷ Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan) x 100%**. Di tahun 2022 realisasi drainase dalam kondisi baik sebesar 76,06 persen. Realisasi ini diperoleh pembagian dari panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 337.087 meter dan panjang drainase keseluruhan sebesar 443.173 meter.

Apabila dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2022 menunjukkan peningkatan positif. Drainase dalam kondisi baik di tahun 2020 mencapai 72,16 persen. Sedangkan realisasi di tahun 2021 sebesar 75,20 persen. Kegiatan yang dilakukan merupakan normalisasi saluran drainase sesuai ketersediaan anggaran dan kebutuhan penanganan darurat.

Tabel III.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2022
1.	Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah	NA	93,70	96,80	94,28	96,98	102,86	100	96,98

Indikator kinerja **Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Panjang jalan kabupaten yang terkoneksi ÷ Panjang jalan kabupaten) x 100%**.

Pada tahun 2022, realisasi indikator **Panjang jalan kabupaten yang terkoneksi** sebesar 96,98 persen atau sepanjang 742,60 Km, diperoleh dari panjang jalan kabupaten yang terkoneksi sepanjang 742,60 km dibagi panjang jalan kabupaten yaitu 765,72 km dikalikan 100%. Sehingga mencapai target konektivitas 94,28%.

Peningkatan Konektivitas antar wilayah dapat terealisasi karena adanya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan dan juga memperhatikan skala prioritas ruas jalan yang akan ditangani untuk tujuan konektivitas antar wilayah.

Tabel III.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kondisi jalan mantap

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2022
1.	Persentase panjang jalan kondisi mantap	75,67	68,66	68,28	66,64	73	109,54	78,40	93,11

Indikator kinerja *Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi mantap (baik+sedang)* dihitung dengan menggunakan rumus = **(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ÷ Panjang seluruh jalan kabupaten) x 100%**. Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/648/Tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Pemalang, dengan Panjang jalan kabupaten sepanjang 765,72 Km.

Pada tahun 2022, realisasi indikator *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap* sebesar 73 persen atau sepanjang 558,98 Km, dengan target kondisi jalan mantap sebesar 66,64%.

Jalan Mantap adalah Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Target kinerja Kemantapan Jalan dapat terealisasi karena adanya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan perbaikan jalan, perencanaan jenis penanganan perbaikan jalan yang sesuai dengan kondisi tingkat kerusakan jalan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga, untuk penanganan cepat pemeliharaan rutin dilaksanakan dengan cara swakelola.

Tabel III.8 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelayanan sistem irigasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2020
1.	Indeks kinerja sistem irigasi	NA	46	52,32	50	53,06	106,12	55	96,47

Pencapaian IKSI per Daerah Irigasi dihitung dengan rumus = **(Penjumlahan dari prosentase Aspek Kondisi Prasarana Fisik (45%) + Aspek Produktivitas Pertanian (15%) + Aspek Sarana Penunjang (10%) + Aspek Organisasi Personalia (15%) + Aspek Dokumentasi (5%) + Aspek Kondisi P3A (10%))**.

Pada tahun 2022 ada 14 (empat belas) Daerah Irigasi (DI) yang ditangani yaitu DI. Rowokajar, DI. Kedungbelis, DI. Welut Putih, DI. Lenggerong, DI. Simpur II, DI. Surajaya, DI. Wregu, DI. Curugwatang, DI. Wadasminah, DI. Siebeg, DI. Rengas, DI. Sidok, DI. Nambo, DI. Lanjiladang. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

➤ **Daerah Irigasi Rowokajar**

D.I. Rowokajar memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **54,11%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 17,49 % dari kondisi maksimal 45%
 - kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang, serta pintu air yang mengalami kerusakan
 - Kondisi saluran pembawa kurang mencakup kapasitas air karena terdapat sedimentasi
 - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
 - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi
 - Akses jalan masuk ke Bendung Rowokajar sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati pematang sawah
 - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Bendung Rowokajar. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas
2. Produktifitas tanam = 14,54% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi sebesar 5 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,2% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,78% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,9% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Rowokajar
6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 4,2% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Kedungbelis**

D.I. Kedungbelis memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **51,99%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 16,42 % dari kondisi maksimal 45%
 - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang, serta pintu air yang mengalami kerusakan
 - Kondisi saluran pembawa kurang mencakup kapasitas air karena terdapat sedimentasi
 - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
 - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi
 - Akses jalan masuk ke Bendung Kedungbelis sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati pematang sawah
 - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Bendung Kedungbelis. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas

2. Produktifitas tanam = 14,42% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi sebesar 4,5 ton/ha
3. Sarana penunjang = 4,86% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 9,39% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,7% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Kedungbelis
6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 4,2% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Welut Putih**

D.I. Welut Putih memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **50,86%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 18,82% dari kondisi maksimal 45%
 - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang, serta pintu air yang mengalami kerusakan
 - Kondisi saluran pembawa kurang mencakup kapasitas air karena terdapat sedimentasi
 - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasitersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
 - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi
 - Akses jalan masuk ke Bendung Welut Putih sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati ematang sawah
 - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Bendung Welut Putih. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas
2. Produktifitas tanam = 13,56% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi sebesar 4,5 ton/ha
3. Sarana penunjang = 4,2% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,78% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,5% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Welut Putih
6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Lenggerong**

D.I. Lenggerong memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **47,05%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 15,93% dari kondisi maksimal 45%

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang, serta pengoperasian mesin pompa yang tidak sesuai dengan Pedoman Tata Tanam yang disepakati oleh Pemerintah.
- Kondisi saluran pembawa kurang mencakup kapasitas air karena terdapat sedimentasi.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung WelutPutih sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati pematang sawah.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Pompa Lenggerong. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 13,98% dari kondisi maksimal 15%

- Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
- Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha

3. Sarana penunjang = 5,5% dari kondisi maksimal 10%

- Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang

4. Organisasi personalia = 7,14% dari kondisi maksimal 15%

- Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai

5. Dokumentasi = 1,5% dari kondisi maksimal 5%

- Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong

6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Simpur II**

D.I. Simpur II memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **41,18%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 10,93% dari kondisi maksimal 45%

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung simpur II sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.

- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Simpur II. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 13,28% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha
 3. Sarana penunjang = 5,6% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
 4. Organisasi personalia = 6,86% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
 5. Dokumentasi = 1,5% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong
 6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Iriqasi Surajaya**

D.I. Surajaya memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **53,60%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 23,61% dari kondisi maksimal 45%
 - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
 - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
 - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
 - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
 - Akses jalan masuk ke Bendung Surajaya masuk areal wisata WIPPAS Kabupaten Pematang.
 - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Surajaya. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 14,39% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha
3. Sarana penunjang = 4,6% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 6,5% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 1,5% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong
6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Wregu**

D.I. Wregu memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **48,77%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 19,41% dari kondisi maksimal 45%

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung Wregu sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Wregu. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 12,40% dari kondisi maksimal 15%

- Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 (masa tanam) sampai MT.3
- Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha

3. Sarana penunjang = 5,6% dari kondisi maksimal 10%

- Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang

4. Organisasi personalia = 6,86% dari kondisi maksimal 15%

- Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai

5. Dokumentasi = 1,5% dari kondisi maksimal 5%

- Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong

6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Curugwatang**

D.I. Curugwatang memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **60,57%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 20,19% dari kondisi maksimal 45%

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung Curugwatang sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.

- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Curugwatang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 13,98% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha
 3. Sarana penunjang = 7% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
 4. Organisasi personalia = 10,50% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
 5. Dokumentasi = 1,9% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong
 6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 7% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Iriqasi Wadasminah**

D.I. Wadasminah memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **66,22%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 24,28% dari kondisi maksimal 45%
 - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
 - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
 - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
 - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
 - Akses jalan masuk ke Bendung Wadasminah sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
 - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Wadasminah. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 12,19% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha
3. Sarana penunjang = 7,6% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 11,15% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,65% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong
6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 7,36% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Siebeg**

D.I. Siebeg memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **59,32%**, dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 17,34% dari kondisi maksimal 45%

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung Siebeg sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Siebeg. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 13,98% dari kondisi maksimal 15%

- Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
- Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha

3. Sarana penunjang = 7% dari kondisi maksimal 10%

- Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang

4. Organisasi personalia = 10,50% dari kondisi maksimal 15%

- Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai

5. Dokumentasi = 3,5% dari kondisi maksimal 5%

- Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong

6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 7% dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Rengas**

D.I. Rengas memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **47,13%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 18,74% dari kondisi maksimal 45%

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung Rengas sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.

- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Rengas. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 4,67% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha
 3. Sarana penunjang = 6,2% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
 4. Organisasi personalia = 10,18% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
 5. Dokumentasi = 2,9% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong
 6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 4,44% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Iriqasi Sidok**

D.I. Sidok memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **36,52%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 12,25% dari kondisi maksimal 45%
 - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
 - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
 - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
 - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
 - Akses jalan masuk ke Bendung Sidok sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
 - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Sidok. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 3,27% dari kondisi maksimal 15%
 - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,4% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,10% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong
6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Nambo**

D.I. Nambo memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **56,95%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 24,57% dari kondisi maksimal 45%

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung Nambo sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung nambo. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 12,98% dari kondisi maksimal 15%

- Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
- Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha

3. Sarana penunjang = 5,90% dari kondisi maksimal 10%

- Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang

4. Organisasi personalia = 6,00% dari kondisi maksimal 15%

- Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai

5. Dokumentasi = 3,3% dari kondisi maksimal 5%

- Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong

6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 4,2% dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➤ **Daerah Irigasi Lanjiladang**

D.I. Lanjiladang memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **68,52%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 23,80% dari kondisi maksimal 45%

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 14,59% dari kondisi maksimal 15%

- Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
 - Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,13 ton/ha
3. Sarana penunjang = 7,64% dari kondisi maksimal 10%
 - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
 4. Organisasi personalia = 11,70% dari kondisi maksimal 15%
 - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
 5. Dokumentasi = 3,80% dari kondisi maksimal 5%
 - Kurang lengkap data dokumentasi pada D.I. Lenggerong
 6. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) = 7% dari kondisi maksimal 10%
 - Perkumpulan petani kurang memadai

Sehingga realisasi indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Tahun 2022 sebesar **53,06 %**. Diperoleh dari rata - rata dari hasil pencapaian keempat belas DI tersebut diatas.

Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi pada tahun 2022 adalah 53,06 % sedangkan pada tahun 2021 adalah 52,32 %. Dari angka tersebut ada kenaikan sebesar 0,74 %, kenaikan angka tersebut masih belum bisa dikatakan keberhasilan kinerja dalam Bidang Sumber Daya Air dikarenakan pada tahun anggaran 2022 adalah masa transisi dari kondisi pandemi ke kondisi normal sehingga Daerah Irigasi yang ada di kabupaten Pemalang hanya dua yang bisa dilakukan kegiatan rehabilitasi, antara lain Daerah Irigasi (D.I) Kedung Belis dan Daerah Irigasi (D.I) Rowokajar, itupun anggaran melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi.

Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Pemalang masih di angka 53 % dimana angka tersebut merupakan penilaian kinerja kurang dan perlu perhatian sesuai (Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015, tentang Penilaian Indeks Kinerja Daerah Irigasi). Bila dikatakan Kondisi Daerah Irigasi bagus apabila mencapai angka minimal 70 % sesuai Peraturan Menteri PUPR. Hal yang masih menjadi tantangan pemerintah kabupaten adalah upaya menjadikan indeks kinerja sistem irigasi menjadi baik, selain kegiatan rehabilitasi pemerintah dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air juga memperhatikan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, dimana kegiatan O&P sangat penting untuk dilaksanakan setelah pekerjaan rehabilitasi ataupun pembangunan Jaringan Irigasi.

7. Sasaran Strategis 7 : **Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang**

Meningkatnya kebutuhan ruang di Kabupaten Pemalang sejalan dengan adanya peningkatan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, disisi lain keberadaan lahan tetap dan terbatas. Sebagai bentuk upaya penataan pada ruang agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang seimbang antara kepentingan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk kegiatan investasi.

Kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Kegiatan yang sesuai dengan penataan ruang diharapkan berdampak positif baik terhadap ekonomi maupun lingkungan. Penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase ketaatan terhadap RTRW adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100 \%$$

Dalam proses pemberian izin usaha di Kabupaten Pemalang salah satu pertimbangan yang harus dipenuhi adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang ada sehingga tingkat ketaatan terhadap RTR di Kabupaten Pemalang sudah 100% karena jika tidak sesuai dengan peruntukan dalam Tata Ruang tidak akan mendapatkan izin yang dibutuhkan.

Hal yang masih menjadi tantangan Pemerintah kabupaten adalah upaya lebih menyadarkan lagi pada masyarakat bahwa hak kepemilikan lahan memang diakui Pemerintah, namun penggunaannya yang diatur untuk keserasian fungsi kawasan lindung dan budidaya. Selama ini, ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa lahan milik mereka akan bebas untuk digunakan apa saja, tidak peduli arahan fungsi ruangnya sebagai kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Sebagai acuan dalam pemberian Informasi Tata Ruang sebelum tahun 2018 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2031, sedangkan pada tahun 2018 hingga sekarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038.

Tabel III.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			RPJMD	
		2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2021
		1.	Pemanfaatan lahan sesuai RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2018 – 2038 yang menjadi dasar dalam proses perizinan di Kabupaten Pemalang. Tingkat ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Pemalang telah diupayakan melalui pengoptimalan proses pengendalian pemanfaatan ruang dalam perizinan, berdasarkan data pengajuan Informasi Tata Ruang (ITR) yang dikelola oleh DPU TR untuk proses perizinan dapat diketahui bahwa pemanfaatan lahan yang diajukan melalui izin seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam RTRW :

Tabel III.10 Kesesuaian RTRW

No	Indikator	Kesesuaian dengan RTRW									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai
1.	Jumlah Permohonan ITR	498	0	441	0	407	0	371	0	449	0
2.	Luasan lahan permohonan ITR (Ha)	730	0	665	0	155	0	463	0	582	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan jumlah permohonan ITR di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang sesuai dengan RTRW, yaitu sebanyak 449 permohonan dengan total luasan lahan yang dimohonkan seluas ± 582 Hektar. Prosentase kenaikan kesesuaian dengan RTRW pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,54 % dari Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan permohonan pemanfaatan tanah yang diajukan sesuai dengan RTRW serta ketentuan-ketentuan terbaru lainnya yang berlaku seperti Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penerbitan dokumen Informasi Tata Ruang (ITR) dikeluarkan apabila lokasi lahan sudah sesuai dengan struktur dan pola ruang RTRW Kabupaten Pemalang, Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk meminimalisir penyalahgunaan terhadap dokumen ITR tersebut.

Dalam proses pemberian izin usaha dan non-berusaha di Kabupaten Pemalang salah satu pertimbangan yang harus dipenuhi adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang ada, sehingga tingkat ketaatan terhadap RTR di Kabupaten Pemalang sudah 100% karena jika tidak sesuai dengan peruntukan dalam Tata Ruang tidak akan mendapatkan izin yang dibutuhkan. Ketentuan RTR yang tersedia saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038. Namun RTRW belum dapat dijadikan acuan detail sebagai perangkat operasional terhadap kesesuaian tata ruang, karena RTRW menggunakan tingkat kedetailan peta yaitu 1:50.000, sehingga perlu adanya pendetailan peta 1:5.000 yang termuat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam RTRW terdapat 5 amanat untuk menyusun RDTR Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Pemalang, Kawasan Perkotaan Comal, Kawasan Perkotaan Randudongkal, Kawasan Perkotaan Moga, dan Kawasan Perkotaan Belik. Mendasari hal tersebut, telah dilakukan proses penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pemalang.

Hal yang masih menjadi tantangan pemerintah kabupaten adalah upaya lebih menyadarkan lagi pada masyarakat bahwa hak kepemilikan lahan memang diakui Pemerintah, namun penggunaannya yang diatur untuk keserasian fungsi kawasan lindung dan budidaya. Selama ini, ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa lahan milik mereka akan bebas untuk digunakan apa saja, tidak peduli arahan fungsi ruangnya sebagai kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

3.2 AKUNTABILITAS ANGGARAN

◆ Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya.

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya pada masing - masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.11 Efisiensi Penggunaan Sumber daya terhadap capaian sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1.	Terseleggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	1,81	8.265.200.000	8.166.514.050	98,81	4,48
2.	Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	88,01	3.771.201.000	3.636.537.495	96,43	2,16
3.	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	65,19	4.355.044.000	4.348.261.680	99,84	2,58
		Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar		1.582.812.000	1.531.215.400	96,74	0,91
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik		820.000.000	815.149.150	99,41	0,48
4.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah	96,98	121.908.380.000	113.740.418.050	93,30	67,44
5.	Meningkatnya kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	73				
6.	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	53,06	5.377.039.000	4.972.401.396	92,47	2,95
7.	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW	100	373.800.000	368.089.217	98,47	0,22

Dari ketujuh sasaran strategis tersebut, tingkat efisiensi yang paling tinggi adalah meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang yaitu mencapai 0,22%, sedangkan tingkat efisiensi yang paling rendah adalah meningkatnya konektivitas antar wilayah dan meningkatnya kondisi jalan mantap yaitu sebesar 67,44%. Hal ini dikarenakan adanya silfa nilai kontrak pekerjaan dari anggaran.

A. Kesimpulan

B. Rencana
Tindak
Lanjut

BAB 4

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil seluruh pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 termasuk kegiatan pada anggaran Perubahan APBD Tahun 2022. Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kabupaten Pematang Jaya.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

1. Penyesuaian pola penanganan kerusakan jalan dengan Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, atau dengan Peningkatan/Pembangunan Jalan;
2. Mengurangi program pemeliharaan jalan dengan pengadaan langsung;
3. Kinerja UPJI pada pemeliharaan rutin jalan dengan pola swakelola;
4. Sesuai dengan pendataan jembatan tahun 2020 bahwa jembatan yang akan direncanakan untuk SK jembatan berjumlah ± 400 jembatan;
5. Koordinasi Antara Pemerintahan Desa, P3A, Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga masyarakat dalam menangani sampah di saluran irigasi;
6. Pembelian SPIDER EXCAVATOR. Alat berat ini dapat digunakan oleh UPJI untuk pengerukan rutin dengan cara swakelola;
7. Melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Pusat sesuai dengan kewenangan daerah irigasi;
8. Pembangunan perangkat Peringatan Dini pengendalian Banjir (FFWS);
9. Penambahan besar alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin dan operasi jaringan irigasi. Namun demikian, alokasi tersebut diusulkan pada UPJI yang dapat melaksanakannya dengan cara swakelola (lebih cepat) dengan besaran Rp. 500.000/ha/tahun untuk DI non teknis dan Rp.800.000- Rp.1000.000/ha/tahun untuk DI teknis. Sedangkan untuk biaya Rehabilitasi dan Peningkatan, menyesuaikan dengan kebutuhan nyata kerusakan yang dilaksanakan kontraktual oleh Bidang SDA;
10. Pembangunan Long Storage bertujuan untuk menahan debit tinggi;
11. Pembangunan pintu pengatur elevasi otomatis, yang berfungsi untuk pengendalian debit tinggi di sungai dan air pasang (rob);
12. Hibah EXCAVATOR AMPHIBI ke KUD nelayan. Diharapkan mereka dapat mengeruk muara setiap saat mereka perlukan untuk kelancaran alur pelayaran;
13. Pembangunan Break water, groin, tanggul pantai;

14. Pengalokasian anggaran lebih untuk penanganan jaringan tersier (kewenangan pusat) dapat ditujukan pada kegiatan swakelola di UPJI terutama pada pemeliharaan berkala (pengurusan sedimen);
15. Pemicuan dan penguatan kapasitas kelembagaan SPAMS agar lebih tepat sasaran pada masyarakat berpenghasilan rendah;
16. Pembuatan masterplant drainase untuk penanganan rencana 5 (lima) tahunan;
17. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem drainase rutin/berkala dan kapasitas anggaran dimaksimalkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Lampiran 2. IKU Perangkat Daerah

Lampiran 3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022 (Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir.HERY FIRMANTIO,M.Si**
Jabatan : **Pt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT, S.T.**
Jabatan : **Pt. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertamaberjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Keduaakan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pt. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI PEMALANG


MANSUR HIDAYAT, S.T.

Pemalang, 19 Oktober 2022
Pihak Pertama,
Pt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Ir.HERY FIRMANTIO,M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (Perubahan)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	2,56
2	Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan	%	88
3	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah	%	94,28
4	Meningkatnya kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	66,64
5	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	%	50
6	Meningkatnya pemanfaatan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW	%	100
7	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	93
		Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	22,5
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	74

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik	%	68
2	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan	%	88
3	Persentase sarana prasarana persampahan sesuai standar	Persentase sarana prasarana persampahan sesuai standar	%	22,5
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	93
5	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	74
6	Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik sesuai tertib administrasi tata bangunan	Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik sesuai tertib administrasi tata bangunan	%	2,56
7	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan	%	20

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
8	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	65
9	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	10
10	Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	%	100
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	44

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.377.039.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.771.201.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.582.812.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.355.044.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	820.000.000
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.561.400.000
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	578.800.000
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	121.908.380.000
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	125.000.000
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	373.800.000
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.206.322.000
Total Anggaran		168.659.798.000



Pihak Kedua,
Ptl. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI
PEMALANG

Mansur Hidayat
MANSUR HIDAYAT, S.T.

Pemalang, 19 Oktober 2022

Pihak Pertama,
Ptl. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Hery Firmantio
Ir.HERY FIRMANTIO, M.Si

Lampiran 2

INDEKS KINERJA UTAMA DPU TR KABUPATEN PEMALANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

Mendasari Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83/Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang 2021-2026;

1. Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	Terwujudnya pengembangan Kota	Persentase Kecamatan yang memiliki infrastruktur lengkap	Terseleenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	$\frac{\text{Total bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik}}{\text{Total bangunan gedung pemerintahan}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
2	Meningkatkan cakupan universal akses air minum	Capaian universal akses air minum	Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani}}{\text{Jumlah total penduduk di Kab. Pemalang}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Meningkatkan sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	Capaian akses sanitasi lingkungan (drainase, persampahan & air limbah domestik)	Meningkatnya akses sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik layak}}{\text{Total jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah TPS/TPST/TPS3R sesuai standar yang terbangun}}{\text{Jumlah kebutuhan TPS/TPST/TPS3R di Kabupaten}} \times 100\%$	
				Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang drainase kabupaten (perkotaan)}} \times 100\%$	
4	Meningkatkan konektivitas jaringan jalan kabupaten	Rasio Konektifitas	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubunginya konaktivitas antar wilayah	%	$\frac{\text{Panjang jalan yang sudah terkoneksi}}{\text{Panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
			Meningkatnya kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang}}{\text{Panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	
5	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	%	Penjumlahan dari : Aspek kondisi Prasarana fisik (45%) Aspek Produktifitas Pertanian (15%) Aspek Sarana Penunjang (10%) Aspek Organisasi Personalia (15%) Aspek Dokumentasi (5%) Aspek Kondisi P3A (10%)	Bidang Sumber Daya Air
6	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW	%	$\frac{\text{Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan sesuai dengan RTRW}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang


MOHAMAD SALEH, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730704 199903 1 007



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN
2022 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 700/7/EVS/2022
TANGGAL : 29 JUNI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

Nomor : 700/ 7 /EVS/2022
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2022.

Pemalang, 29 Juni 2022.
Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang
di-
PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

1.1. Dasar Hukum Evaluasi.

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- e) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/16/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- f) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/001/EVS/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

1.2. Latar Belakang Evaluasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi.

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi.

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi.

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim :

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab		Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si
2.	Dalnis/Supervisor		Drs. HERI SUYATNO
3.	Ketua Tim		ADJI NUSWANTORO, S.Hut
4.	Anggota		AGUS HASANI, S.IP.,MM.
5.	Anggota		MINTARSIH, SE
6.	Anggota		SRI PANGASTUTI, SE
7.	Anggota		KUNENDAR, SE

1.7. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang

a) Dasar hukum pembentukan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dibentuk melalui:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang.

b) Kedudukan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang merupakan unsur Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Tugas dan Fungsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa konstruksi, cipta karya dan tata ruang;
2. pelaksanaan Kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa konstruksi , cipta karya dan tata ruang
3. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga serta konstruksi, cipta karya dan tata ruang
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pematang Jaya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pematang Jaya berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Misi 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan dan Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pematang Jaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 (tujuh) dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 9 (sembilan) .

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang adalah 78,41 %, Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	78	77,70	99,61
2.	Prosentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	93	57,623	61,69
3.	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	100	97,30	97,30
4.	Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik	75	70,26	93,68
5.	Cakupan RT yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipanan	100	90,66	90,66
6.	Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik	71	75,20	105,92
7.	Cakupan Pemanfaatan tata ruang wilayah	100	100	100

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capain kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 78.41 % termasuk dalam kategori baik. Pencapaian tertinggi ada pada Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik yaitu mencapai 105,92, sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi namun belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI.

2.1. Kondisi.

2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2021.

mendapatkan nilai 22,5 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 4,2 dengan bobot sebesar 6 %, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 6,3 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2021 telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja sebanyak 5 (lima) kriteria dari 6 (enam) kriteria yaitu berupa :

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek
- d. Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja
- e. Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi Nihil

- a. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 70 %

2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- d. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.

- e. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- f. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- g. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable- tidak sering diganti dalam 1 periode strategi)
- h. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (Achievable) menantang dan realistis
- i. Setiap Dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)
- j. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Setiap Pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 70.

3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria dari 8 (delapan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- d. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

- f. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- g. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 70.

2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Siabu mendapatkan nilai 19,2 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 3 dengan bobot sebesar 6 %, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,2 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 9 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Siabu telah melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja sebanyak 2 (dua) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang ada yaitu :

- a. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b. Terdapat Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
Sedangkan dokumen Pengukuran Kinerja yang belum ada adalah :

- a. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 50.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- g. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah : nihil

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 70.

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 6 (enam) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi
- c. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- d. Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.

- e. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- f. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja adalah 60.

2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan nilai 10,05 dengan bobot penilaian sebesar 15 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,4 dengan bobot sebesar 3 %, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,15 dengan bobot sebesar 4,50 %, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 4,5 dengan bobot 7,50 %.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang ada yaitu :

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun..
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Adapun kriteria yang belum dipenuhi yaitu : Nihil

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 80.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 7 (tujuh)

kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- g. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Adapun kriteria yang belum terpenuhi yaitu:

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 70.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 7 (Tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi:

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- b. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- d. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- e. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan di hadapi berikutnya
- b. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 60.

2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Mendapat nilai 12,5 dengan bobot penilaian sebesar 25 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 2,5 dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 3,75 dengan bobot sebesar 7,5 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,25 dengan bobot 12,5%.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 1 (satu) kriteria dari 3 (Tiga) kriteria yang ada yaitu :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Sedangkan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum ada adalah :

- a. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan SDM yang memadai.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pendalaman yang memadai.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang Jaya yang telah memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

- b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Adapun kreteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- c. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja.

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022 mendapatkan skor 61,85 dengan predikat kinerja **BAIK (B)**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30	21
		a. Keberadaan	6	4,20
		b. Kualitas / Mutu	9	6,3
		c. Pemanfaatan	15	10,5
2.	Pengukuran Kinerja		30	18,3
		a. Keberadaan	6	3
		b. Kualitas / Mutu	9	6,3
		c. Pemanfaatan	15	9
3.	Pelaporan Kinerja		15	10,05
		a. Keberadaan	3	2,40
		b. Kualitas / Mutu	4,5	3,15
		c. Pemanfaatan	7,50	4,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25	12,50
		a. Keberadaan	5	2,5
		b. Kualitas / Mutu	7,5	3,75
		c. Pemanfaatan	12,5	6,25
	Total Nilai		100	61,85

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,69 yaitu dari 59,16 menjadi 61,85 pada Tahun 2022.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.2. Rekomendasi.

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya.
- 2) Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dan menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar penyesuaian Strategi, Kebijakan dan penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 3) Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan di hadapi berikutnya, serta dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- 4) Agar menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b. PENUTUP.

3.1. Simpulan.

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi.

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pematang memperoleh nilai **61,85** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21
b.	Pengukuran Kinerja	30	18,3
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,05
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	61,85

3.1.2. Kategori Penilaian.

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 61,85 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori penilaian "BAIK" (B) dengan interpretasi bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja).

3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mendorong setiap pegawai untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Pengukuran Kinerja untuk menjadi dasar dalam penyesuaian dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

- 3) Melakukan reviu Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal.



INSPEKTUR
KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

[Handwritten Signature]

EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008.

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG**

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya	Penyusunan SOP Perencanaan Kinerja
2	Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dan menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar penyesuaian Strategi, Kebijakan dan penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja	Penyusunan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja
3	Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan di hadapi berikutnya, serta dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Laporan kinerja akan disajikan dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta menginfokan perbandingan realisasi - realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), dan menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
4	Agar menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja, dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internsl untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

Pemalang, 22 Juli 2022
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG
 Sekretaris,

 H. HERY FIRMANTIO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19651224 199403 1 009



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : SETDA	Diterima tgl : 27 Februari 2023
No dan Tgl : 060 / 314 / Organisasi 24-2-2023	No. Agenda : 437 Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Rekomendasi atas LKJIP Tahun 2022	
Diteruskan kepada Sdr :	<input type="checkbox"/> Kepala Bidang Sumber Daya Air <input type="checkbox"/> Kepala Bidang Jasa Konstruksi CK & Tata Ruang <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Kepala Bidang Bina Marga	
Catatan :	
Kadin	
Agendaris	
Kasi : Kasubag : <i>Biqunam & Kue</i> <i>Tr segera</i> <i>28/2/23</i> Sekdin/Kabid *)	Sdr. <i>Mba Dian</i> <i>Di perbaiki Don</i> <i>LKJIP nya</i> <i>28/2/23</i> Kasi/Kasubag *)



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor : 060/314/Organisasi
Sifat : "Penting"
Perihal : Rekomendasi atas LKjIP
Tahun 2022

Pemalang, 24 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang
Di

PEMALANG

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah dilakukan reviu atas dokumen Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP). Untuk selanjutnya, kami sampaikan rekomendasi atas penyempurnaan dokumen LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerapian dan ketepatan dalam penulisan
Masih terdapat ukuran font tidak sama (hal 19, 23, 27, 28)
Rekomendasi:
Perlu adanya kecermatan dalam penulisan.
2. Bab III
 - a. Pada poin sasaran strategis 1 sampai 7 (hal. 31 – 44) belum ada Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - b. Pada tabel III.11 kolom Capaian Sasaran Indikator Kinerja (kolom 4) data yang disajikan adalah realisasi. Seharusnya pada kolom tersebut berisi capaian sasaran yang merupakan rata-rata dari capaian per indikator pada sasaran dimaksud.
 - c. Belum mencantumkan analisis efisiensi sumberdaya. Efisiensi sumberdaya diasumsikan tercapai jika sebuah sasaran telah mencapai/melampaui target kinerja dan masih ada sisa anggaran. Sisa anggaran yang dimaksud adalah bentuk penghematan, bukan karena adanya kendala teknis seperti gagal lelang, gagal kontrak dll.

Rekomendasi:

Menambahkan dan menyesuaikan sebagaimana ketentuan di atas

3. Lampiran

Dokumen yang disajikan pada lampiran antara lain:

- a. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022;
- b. IKU Perangkat Daerah;
- c. LHE Inspektorat atas AKIP 2022;
- d. Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat;
- e. Daftar Prestasi; dan
- f. Dokumentasi Inovasi

Rekomendasi:

Diharapkan dapat menyajikan informasi sebagaimana di atas sehingga dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan.

Demikian hasil rekomendasi atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pemalang, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya dokumen LKjIP yang sudah direvisi dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah agar segera dikirimkan paling lambat hari **Selasa tanggal 28 Februari 2023 ke Inspektorat Kabupaten Pemalang** dalam bentuk *hard file* dan *soft file*.

an.BUPATI PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH
Ub.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



Dr. Drs. SUPA'AT, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660805 199302 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, sebagai laporan;
 2. Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang.
-